



RENJA

Rencana Kerja

2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas Rahmat dan hidayah-Nya semata, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Tahun anggaran 2022 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban menyusun Rencana Kerja yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (Satu) tahun.

Rencana Kerja (Renja) merupakan implementasi penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang memuat Tujuan, Sasaran, Evaluasi Kegiatan Tahun sebelumnya, Program dan kegiatan serta indikator kinerja.

Dengan adanya Rencana Kerja diharapkan dapat menyusun RAPBD yang lebih objektif karena rencana program dan kegiatan dalam Rencana Kerja tersebut sedapat mungkin terukur dan telah memperhitungkan ketersediaan anggaran.

Akhirnya Rencana Kerja (RENJA) ini diharapkan dapat menjadi wujud pertanggung jawaban Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku dalam melaksanakan Visi dan Misinya sesuai Rencana Strategis Dinas.

Ambon, Maret 2021

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Maluku

DENNY DONALD LILIPORY, ST., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/C)

NIP. 19641012 199703 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Bab I : Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika.....	5
Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021.....	6
2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	6
2.3. Isu-Isu Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	8
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	8
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.....	11
Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	12
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	13
3.3. Program dan Kegiatan.....	13
Bab IV : Penutup	
Lampiran.	



BAB - I

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai dokumen rencana tahunan OPD, Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

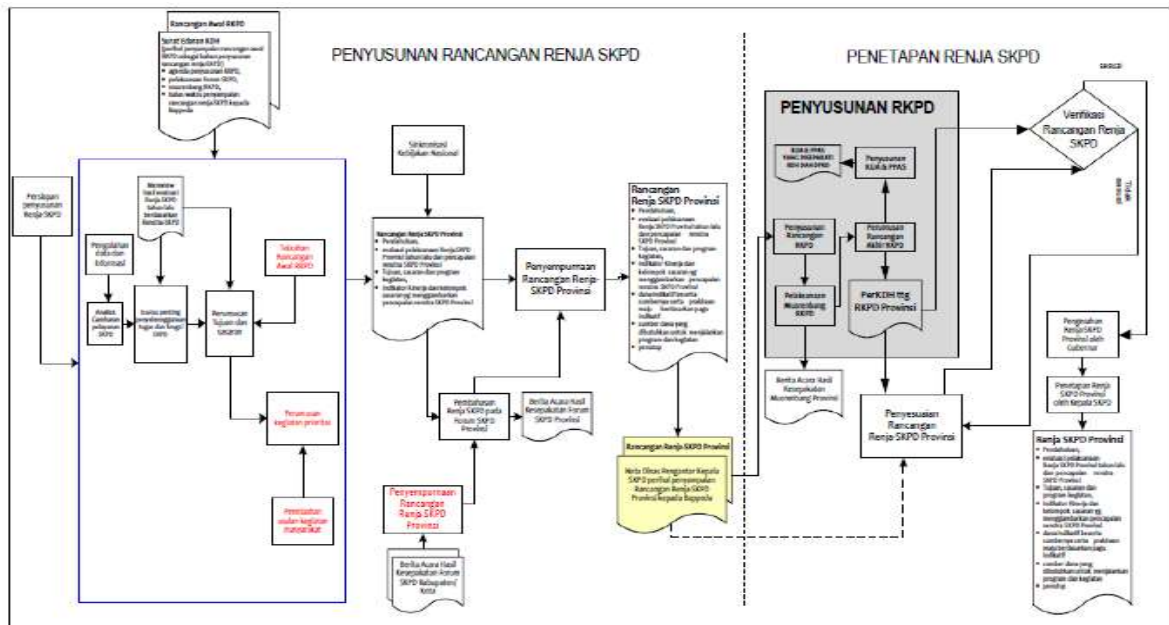
Pada tahun 2021 ini merupakan tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra) 2019-2024. Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021 antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.

2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku menyusun Rencana Kerja Tahun 2022. Renja OPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran OPD.



Gambar 1.
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum penyusunan Renja OPD Tahun 2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku;
24. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku.

1.3 Maksud dan Tujuan

Secara umum, maksud penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk satu tahun mendatang.

Secara khusus Rencana Kerja ini mempunyai tujuan:

1. Memberikan landasan operasional bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku dalam menyusun Rencana Kegiatan tahun 2022;
2. Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022;
3. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
4. Sebagai petunjuk operasional bagi penyelenggaraan pembangunan tahun 2022.

1.4 Sistematika

Untuk memudahkan pemahaman dari konsep Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Merupakan penjelasan umum, latar belakang, landasan hukum penyusunan Renja OPD, maksud dan tujuan penyusunan Renja serta sistematika Renja Tahun 2022.

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

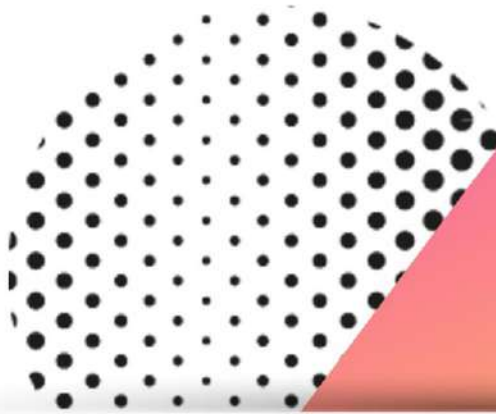
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-4) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-3), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Strategis Dinas, Review terhadap Rancangan Awal RKPD serta Penelaahan Program dan Kegiatan.

Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Merupakan hasil telaah kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja OPD serta program dan kegiatan tahun 2022.

Bab IV : Penutup

Menguraikan secara singkat mengenai penegasan kembali penyusunan Renja OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Tahun 2022, serta harapan-harapan keberhasilan pelaksanaannya.



BAB - II



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja *capaian* program/kegiatan maupun realisasi. Pelaksanaan Urusan Wajib Perumahan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku tahun 2021 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 30.613.084.011,- yang bertujuan melaksanakan program dan kegiatan dengan tingkat capaian kinerja adalah sebagai berikut dalam tabel terlampir-1.

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

A. Tugas Pokok dan Fungsi OPD

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku mempunyai tugas: **“Membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Provinsi”**, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- d. Pembinaan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- g. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku disusun berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku dan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku dengan susunan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Rumah Umum, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian; dan
 2. Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan.
- d. Bidang Rumah Swadaya, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian; dan
 2. Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan.
- e. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian; dan
 2. Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan.
- f. Bidang Prasarana dan Pembiayaan, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian; dan
 2. Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Permasalahan Terkait Kinerja OPD

Permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain:

1. Tingginya pertumbuhan penduduk tidak sebanding dengan bertambahnya jumlah rumah tinggal per KK (kepala keluarga) mengakibatkan masih tingginya tingkat backlog;
2. Masih banyaknya kualitas rumah di kawasan perkotaan dan pedesaan yang belum memenuhi kriteria layak huni;
3. Tingginya perpindahan penduduk/urbanisasi yang semakin meningkat menyebabkan kesan kekumuhan di lokasi padat penduduk;
4. Aksesibilitas dan jangkauan pelayanan terhadap perumahan beserta sarana prasarananya yang belum memadai;
5. Pembangunan perumahan khususnya di area perkotaan terkendala proses pengadaan lahan;
6. Data base Perumahan dan Permukiman yang belum ter-update;
7. Belum mantapnya sistem koordinasi penyelenggaraan perumahan dan permukiman, antar wilayah maupun antar sektor.

2.3. Isu-Isu Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Isu-isu strategis yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku antara lain:

1. Belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal dibidang perumahan dalam rangka tercapainya target Rumah Layak Huni dan terjangkau serta penyediaan sarana dan prasarana dan utilitas yang memadai
2. Keterbatasan kapasitas pengembang (developer) yang belum didukung oleh regulasi yang bersifat insentif
3. Rendahnya keterjangkauan (affordability MBR baik membangun atau membeli rumah) salah satu penyebab masih banyaknya MBR belum tinggal di rumah layak huni (potensi perumahan dan permukiman kumuh)

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Ada lima pendekatan dalam penyusunan RKPD, yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, top-down, dan bottom-up.

1. Pendekatan Teknokratis (Strategis dan Berbasis Kinerja)

Dokumen RKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis. Kualitas dokumen RKPD sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang diusulkan RKPD dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang disepakati dalam Musrenbang RKPD. Penyusunan RKPD sangat erat kaitannya dengan kompetensi dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan. Pendekatan teknokratis bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Review menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu
- b. Rumusan status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah masa kini
- c. Rumusan peluang dan tantangan ke depan yang mempengaruhi penyusunan RKPD
- d. Rumusan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan
- e. Pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana (kendala fiskal daerah)
- f. Rumusan dan prioritas program dan kegiatan OPD berbasis kinerja
- g. Tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan dengan mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimal
- h. Tolok ukur dan target kinerja keluaran
- i. Tolok ukur dan target kinerja hasil
- j. Pagu indikatif program dan kegiatan.
- k. Prakiraan maju pendanaan program dan kegiatan untuk satu tahun berikutnya
- l. Kejelasan siapa bertanggungjawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk review kemajuan pencapaian sasaran

2. Pendekatan Demokratis dan Partisipatif

Pendekatan demokratis dan partisipatif bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Identifikasi pemangku kepentingan yang relevan untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di setiap tahapan penyusunan RKPD
- b. Kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan non pemerintah dalam pengambilan keputusan
- c. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan
- d. Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal
- e. Rasa memiliki masyarakat terhadap RKPD
- f. Pelibatan media
- g. Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang berkualitas dari segi penerapan perencanaan partisipatif
- h. Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti: perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, dan kebijakan dan prioritas program

3. Pendekatan Politis

Pendekatan politis bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Konsultasi dengan Kepala Daerah untuk penerjemahan yang tepat, sistematis atas visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah
- b. Keterlibatan aktif DPRD dalam proses penyusunan RKPD
- c. Jaring aspirasi masyarakat (reses) oleh DPRD merupakan bagian integral dari proses penyusunan RKPD
- d. Pokok-pokok pikiran DPRD dalam proses penyusunan RKPD
- e. Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD yang setelah ditetapkan akan mengikat semua pihak sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD

4. Pendekatan Bottom-up

Pendekatan bottom-up bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih
- b. Memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan daerah
- c. Mempertimbangkan hasil Forum OPD

5. Pendekatan Top-down

Pendekatan top-down bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Sinergi dengan RKP dan RENJA K/L
- b. Sinergi dan konsistensi dengan RPJMD maupun RPJPD
- c. Sinergi dan konsistensi dengan RTRWD
- d. Penanganan masalah dengan pendekatan holistik dan pendekatan sistem
- e. Sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan pembangunan global seperti *Millenium Development Goals (MDGs)*, *Sustainable Development*, pemenuhan Hak Asasi Manusia, pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), dan sebagainya.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku menerima usulan program dan kegiatan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota pada saat pelaksanaan Rapat Kerja (Forum) OPD Provinsi dan telah diakomodir dalam rumusan Rencana Kerja.

A decorative background featuring a large circle with a vertical color gradient from pink at the top to blue at the bottom. A white horizontal bar with a drop shadow is positioned across the middle of the circle, containing the text "BAB - III". To the right of the circle is a black triangle filled with a white dot pattern. Two black diagonal lines cross the circle, one from the top-left and one from the bottom-right. A black zigzag line is located below the circle.

BAB - III

BAB III**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN****3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Renja-OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-OPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list* ke *working plan*. Dimana organisasi perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Renja OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Tahun 2022 disusun dengan tujuan sebagai acuan perencanaan pembangunan, agar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat berjalan dengan baik, serta mampu memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat.

Sasaran Renja OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Tahun 2022 adalah memberikan arah, membangkitkan kesadaran dan komitmen serta menyamakan persepsi aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang rencana implementasi mengurangi angka kemiskinan dan pembangunan infrastruktur di Maluku dalam kurun waktu 1 tahun.

3.3. Program dan Kegiatan

a. Program dan Kegiatan

Pada tahun 2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku merencanakan 4 (Empat) Program, 15 (Lima Belas) Kegiatan dan 28 (Dua Puluh Delapan) Sub Kegiatan yang termasuk dalam 1 Prioritas Daerah, yakni Prioritas I :

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran, dengan Program Prioritas I.1 : Program Pengembangan Perumahan.

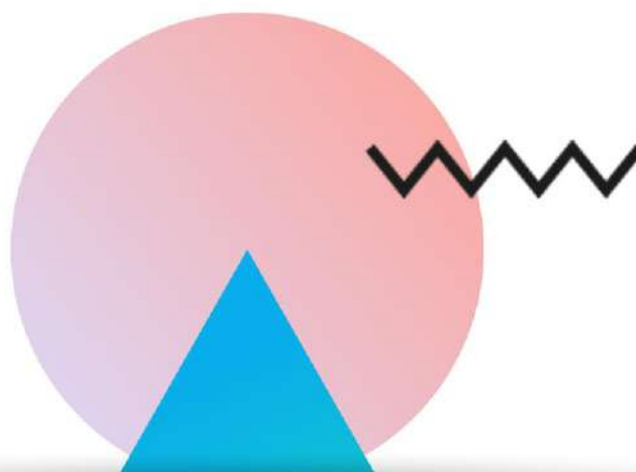
Selengkapnya usulan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Tahun 2022 dapat dilihat pada usulan Rencana Kerja OPD (terlampir-2).

b. Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan

Rencana lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Tahun 2022 tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.

c. Jumlah Pagu Indikatif

Rencana kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Tahun 2022 sebesar Rp. 219.291.432.559,- (Dua Ratus Sembilan Belas Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).



BAB - IV



BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku (stakeholders) dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi Provinsi Maluku serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2022. Rencana Program dan Kegiatan serta Pagu Indikatif didalam Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Tahun 2022, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.



×

A decorative graphic consisting of overlapping geometric shapes. A large purple-to-blue gradient pentagon is the central element. It is overlaid by a black-outlined rectangle. To the right and bottom-left of the pentagon are circular areas filled with black polka dots. The word "LAMPIRAN" is centered horizontally across the middle of the graphic.

LAMPIRAN

+

TABEL EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021

No	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	Realisasi Kegiatan			Sisa Pagu (Rp)	Keluaran (Output)	Hasil (Outcome)	Lokasi Kegiatan (Kab/Kota)	KET.
					Keuangan		Fisik (%)					
					Rp.	%						
	Total			30.613.084.011	27.500.806.183	90	98	3.112.277.828				
1	I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	552.596.887	532.359.721	96	96	20.237.166	Belanja sewa internet (astinet) Telkom , pengadaan peralatan gedung kantor penunjang website dan Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi Kanto 3 orang	Mendukung penyediaan informasi perumahan dan permukiman yang aktual dan ter-update	AMBON	
2	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.884.795.289	5.145.672.998	87	87	739.122.291	Tersedia Gaji dan Tunjangan ASN 58 Orang di Dinas PKP	tersedianya gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil	AMBON	
3	-	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	449.999.967	353.054.159	78	78	96.945.808	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 26 org 13 kali dan perjalanan dinas luar daerah 4 orang 3 kali serta penyediaan tenaga administrasi perkantoran 4 orang	Terlaksananya monitoring, evaluasi pengendalian program/kegiatan di kabupaten/kota dan penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan dinas PKP Tersedianya Jasa Pengaman Kantor, Tenaga Administrasi dan Teknis Lainnya	PROV	
4	-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	99.999.866	50.337.548	50	50	49.662.318	Pimpinan dan staf mengikuti konsultasi dan koordinasi luar daerah sebanyak 3 orang 6 kali	Terlaksananya Rapat rapat Konsultasi Dan Koordinasi Keluar Daerah (koordinasi Laporan Keuangan, Kepegawaian Dan Aset) Kegiatan Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan DPKP	PROV	
5	-	-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.264.586.244	1.171.953.450	93	93	92.632.794	Penataan Aset aset Dinas PKP dan Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Lainnya sebanyak 33 orang	Tersusunnya Aset-Aset Dinas PKP Promal	PROV	
6	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	197.199.943	140.955.064	71	71	56.244.879	2 orang staf Dinas PKP Provinsi Maluku mengikuti diklat dan bimbingan teknis di Jakarta. Staf Dinas PKP Provinsi Maluku mengikuti diklat dan bimbingan teknis 1 kegiatan	Peningkatan kualitas kerja aparatur Dinas PKP Provinsi Maluku.	PROV	
7	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	74.996.300	32.373.600	43	43	42.622.700	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor selama 12 bulan	Kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan tugas-tugas kantor	AMBON	
8	-	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	184.374.781	180.310.781	98	98	4.064.000	Belanja Peralatan kantor dan rompi serta baju olahraga dinas	Tersedianya peralatan gedung kantor penunjang operasional perkantoran	AMBON	
9	-	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.000.000	109.667.700	55	55	90.332.300	Tersedianya snack 60 orang 50 kali dan makan dan minuman pelaksanaan rapat-rapat untuk 50 orang sebanyak 50 kali.	Terwujudnya Kelancaran pelaksanaan Rapat kantor	AMBON	
10	-	-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	105.000.000	87.678.500	84	84	17.321.500	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan pada Dinas PKP Provinsi Maluku	Kelancaran pelaksanaan tugas administrasi perkantoran	AMBON	
11	-	-	Penyediaan Bahan/Material	99.999.275	99.167.820	99	99	831.455	Tersedianya alat tulis kantor pada Dinas PKP Provinsi Maluku selama 12 bulan	Kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan tugas-tugas kantor	AMBON	
12	-	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.899.623.934	1.557.515.573	82	82	342.108.361	Pimpinan dan staf mengikuti konsultasi dan koordinasi dalam daerah sebanyak 52 orang 21 kali serta Luar daerah sebanyak 8 orang 25 kali	Sinkronisasi dan sinergitas penyusunan dan pelaksanaan rencana dan kegiatan di bidang perumahan dan permukiman	PROV	
13	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	118.831.231	111.966.391	94	94	6.864.840	Belanja meubeler kantor dinas PKP	Tersedianya meubeleur kantor	AMBON	
14	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	124.999.980	97.642.596	78	78	27.357.384	Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada DPKP Promal selama 12 bulan	Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perkantoran	AMBON	
15	-	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	301.892.054	301.009.504	100	100	882.550	Tersedianya 1 supervisor + 6 petugas kebersihan dan peralatan kebersihan	Terjaganya kebersihan dan kenyamanan lingkungan kantor Dinas PKP Provinsi Maluku	AMBON	
16	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	392.932.722	263.743.804	67	67	129.188.918	Service 5 unit kendaraan dinas roda 4 dan 13 unit kendaraan dinas roda 2, pembelian Suku Cadang/Spare Part untuk Sunit kendaraan dinas roda 4 , serta pajak kendaraan	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	AMBON	

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 Provinsi Maluku
 Unit Organisasi : 1.04.5.01.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Sub Unit Organisasi : 1.04.5.01.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
						dikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan		
1	4	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							13.739.869.414	
1	4	1	101		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							626.999.876	
1	04	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Belanja sewa internet (astinet) Telkom dan pengadaan peralatan gedung kantor penunjang website Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi Kantor dan Teknis Lainnya	12 Bulan 3 Orang			Prov. Maluku	626.999.876
1	4	1	102		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							6.379.795.253	
1	04	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Tersedianya Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil	12 Bulan				5.884.795.289
1	04	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Terlaksananya monitoring, evaluasi pengendalian program/kegiatan di kabupaten/kota dan penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan dinas PKP Tersedianya Jasa Pengaman Kantor, Tenaga Administrasi dan Teknis Lainnya	1 Paket 3 Orang			Prov. Maluku	494.999.964
1	4	1	103		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							1.501.044.721	
1	04	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			Terlaksananya Rapat-rapat Konsultasi Dan Koordinasi Keluar Daerah (koordinasi Laporan Keuangan, Kepegawaian Dan Aset) Kegiatan Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan DPKP	1 Paket			Prov. Maluku	109.999.853
1	04	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Terlaksananya Penataan Aset-aset Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Tersedianya Jasa Pengaman Kantor Tenaga Administrasi dan	1 Paket 33 Orang			Prov. Maluku	1.391.044.868
1	4	1	105		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							267.947.837	
1	04	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Terlaksananya Pendidikan Bimbingan Teknis	1 Paket			Prov. Maluku	267.947.837

Kode				Program/ Kegiatan		Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
						dikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan		
1	4	1	106	Administrasi Umum Perangkat Daerah								3.015.126.719	
1	04	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor selama 12 bulan	12 Bulan			Prov. Maluku	82.495.930
1	04	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan			Prov. Maluku	202.812.259
1	04	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Tersedianya makanan dan minuman untuk konsumsi rapat dalam Dinas PKP	12 Bulan			Prov. Maluku	220.000.000
1	04	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Tersedianya cetak dan penggandaan selama 12 bulan	12 Bulan			Prov. Maluku	165.000.000
1	04	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Tersedianya alat komunikasi listrik dan air bagi bagunan kantor selama 12 bulan	12 Bulan			Prov. Maluku	109.999.203
1	04	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi Kantor dan Teknis Lainnya	1 Paket 1 Paket 36 Orang			Prov. Maluku	2.234.819.327
1	4	1	107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								130.714.354	
1	04	01	1.07	05	Pengadaan Mebel			Tersedianya Mebeleur	1 Paket			Prov. Maluku	130.714.354
1	4	1	108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								472.826.237	
1	04	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			Tersedianya alat komunikasi listrik dan air bagi bagunan kantor selama 12 bulan	12 Bulan			Prov. Maluku	137.499.978
1	04	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Peningkatan kualitas Pelayanan pada Kantor Dinas PKP Provinsi Maluku	12 Bulan			Prov. Maluku	335.326.259
1	4	1	109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1.345.414.417	
1	04	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	1 Paket			Prov. Maluku	432.225.994
1	04	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Terehabilitasinya gedung kantor Dinas PKP Provinsi Maluku	1 Paket			Prov. Maluku	778.738.379
1	04	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Terpeliharanya kondisi gedung kantor Dinas PKP Provinsi Maluku	12 Bulan			Prov. Maluku	134.450.043

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
						dikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan		
1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN								26.915.510.282
1	4	2	101		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi								659.999.923
1	04	02	1.01	06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat Rumah Susun dan Rumah Khusus			Terlaksananya pengembangan sistem database pembangunan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi Kantor dan Teknis Lainnya	1 Paket 3 Orang			Prov. Maluku	659.999.923
1	4	2	102		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi								470.510.359
1	04	02	1.02	01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana			Terlaksananya Studi investigasi dan desain penataan pengembangan perumahan dan kawasan kumuh dan rawan bencana Provinsi Maluku Tersedianya Jasa Pengaman Kantor, Tenaga Administrasi dan Teknis Lainnya	1 Kegiatan 1 Orang			Prov. Maluku	470.510.359
1	4	2	103		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi								25.785.000.000
1	04	02	1.03	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana			Terbangunnya rumah layak huni Paket				25.785.000.000
					- <i>Pembangunan Home Stay Di Desa Lumasebu</i>							<i>Kep. Tanimbar</i>	<i>600.000.000</i>
					- <i>Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Kec. Baguala Teluk Ambon dan Leitimu Selatan Kota Ambon</i>							<i>Kota ambon</i>	<i>1.000.000.000</i>
					- <i>Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Kec. Sirimau dan Kec. Nusaniwe</i>							<i>Kota tual</i>	<i>1.000.000.000</i>
					- <i>Belanja Bahan Bangunan Rumah (Kota Ambon) Kepada Masyarakat pasca bencana / Akibat kebijakan Pemerintah (SPM)</i>							<i>Kota ambon</i>	<i>600.000.000</i>
					- <i>Pembangunan Rumah / Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Seram Bagian Timur Negeri Administratif Selagur Kota, Kec. Wida</i>							<i>Kota ambon</i>	<i>600.000.000</i>
					- <i>Rumah Guru SMA NEGERI ELAT Kei Besar</i>							<i>kab. Malra</i>	<i>350.000.000</i>
					- <i>Rumah Guru SMA NEGERI Weduar</i>							<i>kab. Malra</i>	<i>350.000.000</i>
					- <i>Rumah Dinas tenaga medis Holat Puskesmas Holat</i>							<i>kab. Malra</i>	<i>350.000.000</i>
					- <i>Rumah Dinas tenaga medis Banda Ely Puskesmas Banda Ely</i>							<i>kab. Malra</i>	<i>350.000.000</i>
					- <i>Rumah Dinas tenaga medis Mun Puskesmas Mun</i>							<i>kab. Malra</i>	<i>350.000.000</i>
					- <i>Pembangunan Rumah Home Stay Ohoi Lilir</i>							<i>kab. Malra</i>	<i>350.000.000</i>
					- <i>Pembangunan Rumah Home Stay Ohoi ngilngof</i>							<i>kab. Malra</i>	<i>350.000.000</i>
					- <i>Pembangunan Rumah RLH Ambon (Tersebar)</i>							<i>Kota ambon</i>	<i>500.000.000</i>

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target		
	- Pembangunan Rumah Guru SMA Negeri Desa Ohoiel							Kota tual	350.000.000
	- Pembangunan Rumah tenaga medis Desa Tiflen							Kota tual	350.000.000
	- Pembangunan Home Stay Desa Yamtel							Kota tual	350.000.000
	- Pembangunan Home Stay Desa Labetawi (Pantai Difur)							Kota tual	350.000.000
	- Pembangunan Rumah Guru SMA Negeri Jerol							Kep. Aru	250.000.000
	- Pembangunan Rumah Guru SMA Negeri Benjina							Kep. Aru	250.000.000
	- Pembangunan Rumah Guru SMA Negeri Di Kota Dobo (Lingkungan Sekolah)							Kep. Aru	250.000.000
	- Pembangunan Rumah Tenaga medis Desa Ujir							Kep. Aru	250.000.000
	- Pembangunan Rumah Tenaga medis Desa Kec. Aru Selatan							Kep. Aru	250.000.000
	- Pembangunan Rumah Tenaga medis Desa Kec. Aru Selatan Timur							Kep. Aru	250.000.000
	- Pembangunan Rumah Tenaga medis Desa Mesiang							Kep. Aru	250.000.000
	- Pembangunan Rumah Tenaga medis Desa Kalar-Kalar							Kep. Aru	250.000.000
	- Pembangunan Rumah Home Stay Desa Wamar							Kep. Aru	350.000.000
	- Pembangunan Rumah Guru SMA Negeri 4 SBT Kataloka							SBT	250.000.000
	- Pembangunan Rumah Guru SMA Negeri 7 SBT Utta							SBT	250.000.000
	- Pembangunan Rumah Guru SMA Negeri 10 SBT Miran							SBT	250.000.000
	- Pembangunan Rumah Puskesmas Kataloka							SBT	250.000.000
	- Pembangunan Rumah Puskesmas Geser							SBT	250.000.000
	- Pembangunan Rumah Puskesmas Werinama							SBT	250.000.000
	- Pembangunan Rumah Akibat Bencana Kebakaran Waimital Kec. Kairatu							SBB	550.000.000
	- Pembangunan Rumah Akibat Bencana Kebakaran Lohiatala Kec. Kairatu Barat							SBB	400.000.000
	- Pembangunan Rumah Desa Lorwembun Kec. Kormomolin							Kab. KTT	700.000.000
	- Pembangunan Rumah Desa Amdasa Kec. Wertamrian							Kab. KTT	700.000.000

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
						dikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target		
1	4	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN							86.666.423.050	
1	4	3	101		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha							692.423.050	
1	04	03	1.01	08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP			Terlaksananya kegiatan Klinik PKP Terlaksananya Kemitraan KLD (Kementrian dan Lembaga Daerah) Media Masa dan Masyarakat dalam Rangka Rencana dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Rawan Bencana Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi Kantor dan Teknis	1 Paket 1 Kegiatan 1 Orang			Prov. Maluku	592.693.563
1	04	03	1.01	09	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman							Prov. Maluku	99.729.487
1	4	3	102		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha							85.974.000.000	
1	04	03	1.02	03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			Peningkatan Kualitas Rumah menjadi layak huni Paket				17.424.000.000
					- Peningkatan Kualitas RTLH Pasca Bencana Kab. Malteng (Tersebar)							kab. Maluku tengah	1.000.000.000
					- Peningkatan Kualitas RTLH Pasca Bencana Kab. SBB (Tersebar)							Kab. SBB	1.000.000.000
					- Peningkatan Kualitas RTLH Pasca Bencana Kota Ambon (Tersebar)							Kota ambon	1.000.000.000
					- Peningkatan Kualitas RTLH Kota Ambon (Tersebar)							Kota ambon	500.000.000
					- Peningkatan Kualitas RTLH Kelurahan Waihaong Kota Ambon							Kota ambon	400.000.000
					- Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kab. Kep Aru (Tersebar)							Kab. Kep Aru	500.000.000
					- Peningkatan Kualitas RTLH kota ambon, kelurahan urimesing. Kec.nusaniwe kota Ambon							Kota ambon	450.000.000
					- Peningkatan Kualitas RTLH kec. Baguala kota ambon							Kota ambon	400.000.000
					Peningkatan Kualitas RTLH Negeri Laha Kec. Telutih kab. Maluku Tengah							kab. Maluku tengah	500.000.000
					Peningkatan Kualitas RTLH Negeri Haruku - Sameth Kab. Maluku Tengah							kab. Maluku tengah	1.000.000.000
					- Peningkatan Kualitas RTLH Negeri Tengah-Tengah Kab. Maluku Tengah							kab. Maluku tengah	500.000.000
					- Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kec. Wetar Utara							Kab. MBD	700.000.000

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target		
	- Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kec. Wetar Barat (Klishatu)							Kab. MBD	525.000.000
	- Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kec. Wetar Barat Ilmamahu							Kab. MBD	525.000.000
	- Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kec. Dawelor Dawera desa Welora							Kab. MBD	525.000.000
	- Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kec. Dawelor Dawera desa Ilmarang							Kab. MBD	525.000.000
	- Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Desa Batmiyao Pulau Leti (Stunting)							Kab. MBD	700.000.000
	- Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Ambon Tersebar 1							Kota Ambon	450.000.000
	- Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Ambon Tersebar 2							Kota Ambon	450.000.000
	- Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kota Tual							Kota Tual	400.000.000
	- Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kab. Buru							Kab. Buru	350.000.000
	- Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kab. Buru Selatan							Kab. Bursel	400.000.000
	- Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kab. SBB							Kab. SBB	949.000.000
	- Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kab. SBT							Kab. SBT	550.000.000
	- Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Negeri Ampera							Kab. Malteng	350.000.000
	- Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Negeri Alang							Kab. Malteng	350.000.000
	- Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Yamalatu, Kec. Telutih							Kab. Malteng	350.000.000
	- Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kab. Kep Aru							Kep. Aru	625.000.000
	- Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Desa Ridoool							Kep. Tanimbar	350.000.000
	- Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Ritabel							Kep. Tanimbar	350.000.000
	- Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kei besar utara Timur							Kab. Malra	250.000.000
	- Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kei besar utara Barat							Kab. Malra	250.000.000
	- Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Hutumuri, kec. Leitumur Selatan Kota Ambon							Kota ambon	250.000.000

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
						dikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan		
1	04	03	1.02	07	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			Tertatanya kawasan permukiman Kumuh Paket				68.550.000.000
					<i>Penataan Kawasan Kota Ambon Kec. Sirimau</i>							<i>Kota Ambon</i>	<i>1.000.000.000</i>
					<i>Penataan Kawasan Kota Ambon Kec. Baguala</i>							<i>Kota Ambon</i>	<i>1.000.000.000</i>
					<i>Penataan Kawasan Kota Ambon Kec. Teluk Ambon</i>							<i>Kota Ambon</i>	<i>1.000.000.000</i>
					<i>Penataan Kawasan Kota Ambon Kec. Leitimur</i>							<i>Kota Ambon</i>	<i>1.000.000.000</i>
					<i>Pembangunan Talud Di Kelurahan Masrum</i>							<i>kota tual</i>	<i>500.000.000</i>
					<i>Lanjutan Pembangunan Talud Penahan Tanah Kel. Lodar El</i>							<i>kota tual</i>	<i>3.000.000.000</i>
					<i>Penataan Kawasan Kumuh Desa Namlea (tersebar)</i>							<i>Kab. Buru</i>	<i>5.000.000.000</i>
					<i>Penataan Kawasan Lingkungan Bursel (Tesebar)</i>							<i>KAB. Bursel</i>	<i>1.000.000.000</i>
					<i>Penataan Kawasan Lingkungan Taman Kota Bursel</i>							<i>KAB. Bursel</i>	<i>500.000.000</i>
					<i>Talud Penahan Tanah Desa Oki baru Namrole</i>							<i>KAB. Bursel</i>	<i>1.400.000.000</i>
					<i>Penataan Kawasan Desa Kawa Kab. SBB</i>							<i>Kab. SBB</i>	<i>300.000.000</i>
					<i>Penataan Kawasan Lingkungan SBB (Tesebar)</i>							<i>Kab. SBB</i>	<i>1.000.000.000</i>
					<i>Penataan Kawasan Desa Taniwel Kab. SBB</i>							<i>Kab. SBB</i>	<i>300.000.000</i>
					<i>Penataan Kawasan Kec. Kairatu Barat Desa Kamal</i>							<i>Kab. SBB</i>	<i>600.000.000</i>
					<i>Penataan Kawasan Kec. Amalatu Desa Seriholo</i>							<i>Kab. SBB</i>	<i>600.000.000</i>
					<i>Penataan Kawasan Kec. Huamual Dusun Liaela</i>							<i>Kab. SBB</i>	<i>600.000.000</i>
					<i>Penataan Kawasan Kec. Huamual Dusun Waiputi</i>							<i>Kab. SBB</i>	<i>600.000.000</i>
					<i>Penataan Kawasan Kec. Inamosol Desa Hukuanakota</i>							<i>Kab. SBB</i>	<i>600.000.000</i>
					<i>Penataan Kawasan Kumuh Kampung Nelayan Pantai Desa Sesar Kec. Bula</i>							<i>Kab. SBT</i>	<i>500.000.000</i>
					<i>Pembangunan Talud kawasan Permukiman Kota Bula</i>							<i>Kab. SBT</i>	<i>5.000.000.000</i>

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target		
	Penataan Kawasan Desa Wahai Dusun Hatileng Kec. Wahai Seram Utara Malteng							Kab. Maluku Tengah	500.000.000
	Penataan Kawasan Lingkungan Kab Malteng (Tesebar)							Kab. Maluku Tengah	1.000.000.000
	Penataan Kawasan Negeri Nusantara Pulau Banda							Kab. Maluku Tengah	500.000.000
	Penataan Kawasan Perumahan Negeri Haruru Kec. Amahai							Kab. Maluku Tengah	500.000.000
	Penataan Kawasan Kumuh Pesisir Watdek-Ohoijang-Ohoibun							Kab. Maluku Tenggara	1.500.000.000
	Penataan Kawasan Kota Elat							Kab. Maluku Tenggara	2.000.000.000
	Penataan Kawasan Halong							Kota Ambon	600.000.000
	Penataan Kawasan Desa Hatu							Kab. Maluku Tengah	500.000.000
	Penataan Kawasan Desa Passo Kota Ambon							Kota Ambon	1.000.000.000
	penataan kawasan usaha tani negeri alang							Kota Ambon	1.500.000.000
	penataan kawasan desa latuhalat dusun waimahu							Kota Ambon	500.000.000
	Pembangunan Talud Penahan Tanah Kel. Karang Panjang							Kota Ambon	1.500.000.000
	Pembuatan talud pengaman lingkungan kel. Lodar El Kec. Pulau Dullah Selatan							Kota Tual	500.000.000
	Pembangunan talud permukiman desa suli - waitatiri							Kab. Maluku Tengah	500.000.000
	Pembangunan talud penahan tanah di RW 15 Desa batu merah							Kota Ambon	500.000.000
	Pembangunan talud penahan tanah di negeri rumah tiga kec. Teluk ambon							Kota Ambon	500.000.000
	pembangunan talud penahan tanah SMA 14 Negeri Passo							Kota Ambon	1.500.000.000
	Pembangunan Talud penahan tanah desa tengah-tengah kec. Salahutu							Kab. Maluku Tengah	500.000.000
	pembangunan talud penahan tanah negeri alang							Kota Ambon	500.000.000
	Pembangunan Talud penahan tebing desa latuhalat							Kota Ambon	500.000.000
	Pembangunan Talud Penahan Tanah Desa Ohoiwait							Kab. Maluku Tenggara	3.000.000.000
	Pembangunan Talud Penahan Tanah Desa Ohoingan							Kab. Maluku Tenggara	2.000.000.000
	Pembangunan Talud Penahan Tanah Desa Ohoiren							Kab. Maluku Tenggara	5.000.000.000

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
						dikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target		
					Pembangunan Talud Penahan Tanah Desa Watkidat							Kab. Maluku Tenggara	1.000.000.000
					Pembangunan Talud Penahan Tanah Desa Weduarfer							Kab. Maluku Tenggara	1.000.000.000
					Pembangunan Talud Kawasan Permukiman Kep Aru (Tersebar)							Kep. ARU	1.000.000.000
					Pembangunan Talud Siwalima							Kep. ARU	500.000.000
					Penataan Kawasan Lingkungan Siwalima							Kep. ARU	5.000.000.000
					Penataan Kawasan Kumuh Kab Tanimbar							Kep. Tanimbar	400.000.000
					Pembangunan Talud Kawasan Harapan & Gunung Nona							Kep. Tanimbar	500.000.000
					Penataan Kawasan Rumah Khusus Bomaki & Latdalam Kab Tanimbar							Kep. Tanimbar	3.000.000.000
					Penataan Kawasan Kel. Saumlaki							Kep. Tanimbar	800.000.000
					Penataan Kawasan Tiakur (Rumah Khusus)							Kab. MBD	750.000.000
					Penataan Kawasan Lingsuungan Kab MBD (Kampung Babar)							Kab. MBD	1.000.000.000
					Pembangunan Talud Permukiman Nelayan Luang Timur							Kab. MBD	500.000.000
					Penataan Kawasan Di Kompleks PLN (Kec. Maa)							Kab. MBD	1.000.000.000
1	4	5			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)								91.394.000.000
1	4	5	101		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman								91.394.000.000
1	04	05	1.01	02	Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman			Tersedianya Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman Urusan Talud Drainase Penataan Kawasan dan Jalan Lingkungan Permukiman Paket				29.576.500.000
					- Pembangunan Drainase RT 005/RW 018 Desa Batu Merah Kota Ambon Kec. Sirimau							Kota Ambon	435.000.000
					- Peningkatan Kualitas Lingkungan 005/RW 018 Desa Batu Merah Kota Ambon Kec. Sirimau							Kota Ambon	435.000.000
					- Pembangunan Drainase Batu Gajah RT 04 RW 01 Kec. Sirimau							Kota Ambon	340.000.000
					- Pembangunan Drainase di Kab. Maluku tenggara (Langgur) Kec. Kei Kecil							Kab. Maluku Tenggara	478.500.000

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target		
	- Pembangunan Drainase di Kelurahan Masrum Dullah Selatan							Kota Tual	374.000.000
	- Pembangunan Drainase di Desa Fiditan Pantai Dullah Utara							Kota Tual	374.000.000
	- Pembangunan Drainase di Dusun Mangon Dullah Utara							Kota Tual	374.000.000
	- Pembangunan Drainase di Kel Ohoijang Kei Kecil							Kab. Maluku Tenggara	374.000.000
	- Pembangunan Drainase di Desa Danar Kei Kecil Timur Selatan							Kab. Maluku Tenggara	564.000.000
	- Pembangunan Drainase Perumnas Ohoijang Kei Kecil							Kab. Maluku Tenggara	564.000.000
	- Pembangunan Drainase di Desa Watdek							Kab. Maluku Tenggara	564.000.000
	- Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Weeduar Kec.Kei Besar Selatan							Kab. Maluku Tenggara	530.000.000
	- Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong dalam Kota Elat Kec. Kei Besar							Kab. Maluku Tenggara	720.000.000
	- Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Desa Namlea Kab. Buru (Tersebar)							Kab. Buru	3.000.000.000
	- Pembangunan Drainase di Kab. Bursel (tersebar)							Kab. Bursel	1.050.000.000
	- Pembanguunan Saluran Drainase Desa Elara Kec. Ambalau Desa Elara							Kab. Bursel	600.000.000
	- Pembanguunan Saluran Drainase Desa Biloro Kec. Kapala Madang							Kab. Bursel	600.000.000
	- Pembangunan Drainase/Gorong-Gorong Desa Kawa Kec. Seram Barat							Kab. SBB	900.000.000
	- Pembangunan Drainase/Gorong-Gorong Kec.Kairatu Desa Lohiatala Kec. Seram Barat							Kab. SBB	750.000.000
	- Pembangunan Drainase/Gorong-Gorong dalam Kota Piru Kec. Seram Barat							Kab. SBB	1.500.000.000
	- Pembangunan Saluran Drainase Permukiman Dusun Karawatu Kec. Teluk Waru							Kab. SBT	530.000.000
	- Pembangunan Saluran Drainase Permukiman Kota Bula							Kab. SBT	862.500.000
	- Pembangunan Saluran Drainase Desa Kian kec. Kiandarar							Kab. SBT	400.000.000
	- Peningkatan Kualitas Lingkungan di Dusun Ory Desa Pelauw Kec. Pulau Haruku							Kab. Maluku Tengah	400.000.000
	- Pembangunan Saluran Drainase Desa Wolu Kec. Tehoru Malteng							Kab. Maluku Tengah	350.000.000
	- Pembangunan Saluran Drainase Desa Yaputi kec. Tehoru Kab. Malteng							Kab. Maluku Tengah	530.000.000

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			Target
					- Pembangunan Saluran Drainase Desa Hulaliu								Kab. Maluku Tengah	387.500.000
					- Peningkatan kualitas lingkungan dikab maluku tengah (tersebar)								Kab. Maluku Tengah	435.000.000
					- Pembangunan PSU Kawasan Perumahan Adat								Huauulu Seram Utara	1.500.000.000
					- Pembangunan PSU Kawasan Perumahan Adat								Usali- Tehoru	1.000.000.000
					- Pembangunan Drainase di Kab. Kep aru (tersebar) Kota Dobo								Kep. Aru	1.440.000.000
					- Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Depan SMK PGRI Kota Dobo								Kep. Aru	900.000.000
					- Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kampung Baru Kota Dobo								Kep. Aru	900.000.000
					- Pembangunan Drainase di Kab. Kep tanimbar (tersebar)								Kep. Tanimbar	2.475.000.000
					- Rehab Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kawasan tanjung Batu								Kep. Tanimbar	350.000.000
					- Rehab Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kawasan Ritabel								Kep. Tanimbar	350.000.000
					- Pembangunan Drainase di Kab. MBD Desa Batmiyau pulau Leti, Tersebar								Kab. MBD	1.120.000.000
					- Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Permukiman Rumah Khusus ASN Moa								Kab. MBD	1.120.000.000
1	04	05	1.01	05	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman			Tersedianya pembangunan jalan guna mempermudah aksesibilitas serta peningkatan kualitas permukiman Paket					61.817.500.000
					Pembangunan Jalan Lingkungan Talaga Raja								Kota Ambon	425.000.000
					Peningkatan Jalan Lingkungan Siwang, Gunung Nona Kota Ambon								Kota Ambon	425.000.000
					Pembangunan Jalan Hotmix Kompleks Perumahan BTN Passo Indah								Kota Ambon	6.500.000.000
					Pembangunan Jalan Hotmix Perumahan BTN Waeheru								Kota Ambon	6.500.000.000
					Pembangunan Jalan Lingkungan Kelurahan Masrum								Kota Tual	475.000.000

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target		
	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Fiditan Pantai							Kota Tual	475.000.000
	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Tam Ngurhir							Kota Tual	475.000.000
	Jalan Lingkungan Namlea (Tersebar)							Kab. Buru	475.000.000
	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Labuang Kec. Namrole (Polsek Namrole dan Kompi 731 Kabaresi)							Kab. Bursel	570.000.000
	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Waenono Kec. Namrole							Kab. Bursel	570.000.000
	Pembangunan Jalan Lingkungan Air Putri Dusun Waiyoho							Kab. SBB	475.000.000
	Peningkatan Jalan Lingkungan Kota Piru, SBB							Kab. SBB	1.125.000.000
	Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Pawae Desa Loki							Kab. SBB	475.000.000
	Pembangunan Jalan lingkungan desa Eti (RUMAH Khusus Nelayan) SBB							Kab. SBB	475.000.000
	Peningkatan Jalan Lingkungan Rusun ASN							Kab. SBB	4.500.000.000
	Pembangunan Jalan Lingkungan Kota Bula							Kab. SBT	570.000.000
	Peningkatan Jalan Lingkungan Wisata Pantai Keter							Kab. SBT	2.000.000.000
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman (Lapen)							Kab. SBT (Bula)	1.500.000.000
	Pembangunan Jalan Lingkungan Negeri Tanjung							Kab. Maluku Tengah	475.000.000
	Pembangunan Jalan Lingkungan Negeri Wolu							Kab. Maluku Tengah	475.000.000
	Pembangunan Jalan Lingkungan Negeri Mosso							Kab. Maluku Tengah	475.000.000
	Pembangunan Jalan Lingkungan Negeri Tehua							Kab. Maluku Tengah	475.000.000
	Pembangunan Jalan Lingkungan Negeri Sirisori Amalatu, Saparua Timur							Kab. Maluku Tengah	3.000.000.000

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target		
	Pembangunan Jalan Lingkungan Dalam Perumahan Haruru, Kec. Amahai							Kab. MALTENG	617.500.000
	Pembangunan Jalan Lingkungan kampung baru kec. Banda							Kab. MALTENG	665.000.000
	Peningkatan jalan lingkungan lapen desa rajawali kec. Banda							Kab. MALTENG	2.250.000.000
	Pembangunan Jalan Lingkungan dusun gunung api kec. Banda							Kab. MALTENG	380.000.000
	Peningkatan jalan Lapen kawasan perumahan warga desa kampung baru kec. Banda							Kab. MALTENG	750.000.000
	Peningkatan Jalan Hotmix Dalam Kota Langgur (Kawasan Permukiman Pokarina)							Kab. Maluku Tenggara	1.125.000.000
	- Peningkatan Jalan Hotmix Dalam Ohoi Evu							Kab. Maluku Tenggara	1.125.000.000
	- Peningkatan Jalan Hotmix Dalam Ohoi Ngayub							Kab. Maluku Tenggara	1.125.000.000
	Pembangunan Jalan Lingkungan hotmix dalam Kota Elat Kab. Maluku Tenggara							Kab. Maluku Tenggara	1.800.000.000
	- Peningkatan Jalan Hotmix Dalam Ohoi Ngilingof							Kab. Maluku Tenggara	1.125.000.000
	Pembangunan Jalan hotmix kawasan Ohoi Danar Kec. Kei Kecil Timur Selatan							Kab. Maluku Tenggara	1.125.000.000
	Pembangunan Jalan hotmix kawasan Ohoi Watdek Maluku Tenggara							Kab. Maluku Tenggara	1.350.000.000
	Jalan Lingkungan hotmix Namadjala Kelurahan Siwalima Kep. Aru							Kep. Aru	1.350.000.000
	Jalan Lingkungan kelurahan Siwalima							Kep. Aru	1.620.000.000
	Pembangunan Jalan Lingkungan Kawasan Perumahan Rusus Bomaki							Kep. Tanimbar	1.500.000.000
	Pembangunan Jalan Lapen Di Kelurahan Saumlaki							Kep. Tanimbar	1.500.000.000
	Pembangunan Jalan Lingkungan Kawasan Perumahan Rusus Latdalam							Kep. Tanimbar	1.500.000.000
	Pembangunan Jalan Lingkungan Kab. Kepulauan Tanimbar (tersebar)							Kep. Tanimbar	3.000.000.000

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
	Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Nyama Pulau Moa. Kab. MBD							Kab. MBD	600.000.000		
	Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Kiera Pulau Moa Kab. MBD							Kab. MBD	450.000.000		
	Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Yawuru, Pulau Kisar							Kab. MBD	1.500.000.000		
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman Kampung Babar							Kab. MBD	2.250.000.000		
	Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan Hutumuri							Kota Ambon	200.000.000		
5	1	2							PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	575.629.813	
5	1	2	101						Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	575.629.813	
5	01	02	1.01	04					Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD		
						Terlaksananya Forum OPD Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku	1 Kegiatan				
						Terlaksananya Sosialisasi Rumah Sehat	1 Kegiatan			Prov. Maluku	575.629.813
TOTAL									219.291.432.559		

Ambon, Maret 2021
 Kepala Dinas Perumahan dan
 Kawasan Permukiman Provinsi Maluku

DENNY DONALD LILIPORY, ST., M.Si
 Pembina Utama Muda (P/C)
 NIP. 19541012 199703 1 006



ABOUT US :

